

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik pada saat ini semakin meningkat, hal tersebut harus tetap berlanjut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga sistem pemerintahan di Indonesia menjadi lebih baik dan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Bidang akuntansi semakin dibutuhkan khususnya dibidang pemerintahan, akuntansi dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak tertentu.

Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah yaitu setiap daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam hal mengelola keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, SAP yang berbasis akrual mengakui, pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Untuk menjalankan pemerintahan yang baik perlu adanya identifikasi sumber daya yang ada didaerah, sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi belanja daerah terutama belanja modal, karena belanja modal merupakan salah satu hal penting untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, pelayanan publik dapat dijadikan salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah. Dalam Permendagri No.13 tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak langsung terkait dengan program kegiatan. Dalam hal ini belanja modal termasuk pada kelompok belanja langsung karena belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dengan adanya pandemi *Covid 19* di Indonesia yang menyebabkan adanya *refocusing* anggaran yang menyebabkan sebanyak 20% anggaran direlokasikan untuk *covid 19* sehingga mempengaruhi anggaran belanja untuk kegiatan termasuk belanja modal di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

permasalahan yang sering terjadi di suatu Instansi terkait belanja modal adalah perlakuan akuntansi nya, perlakuan akuntansi belanja modal harus dikemukakan dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga dapat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan ekonomi kreatif, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi belanja modal di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi, apakah perlakuan akuntansi belanja modal nya dilakukan sesuai standar akuntansi yang berlaku atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana klasifikasi akuntansi belanja modal di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi?
2. Bagaimana prosedur penatausahaan akuntansi belanja modal di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi?
3. Apakah pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan terhadap asset belanja modal dilakukan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Menguraikan bagaimana klasifikasi dan prosedur penatausahaan belanja modal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi.
2. Menguraikan bagaimana prosedur penatausahaan akuntansi belanja modal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi.
3. Menguraikan bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan terhadap asset belanja modal di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan literatur yang bermanfaat bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor khususnya program studi akuntansi dan juga untuk bahan referensi bagi penulisan tugas akhir di masa yang akan datang.
2. Bagi Mahasiswa
Dalam penulisan tugas akhir ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi belanja modal yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Bagi Pembaca

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan perlakuan akuntansi belanja modal yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.